



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. BERLIAN ADJIE
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 232979

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.330.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m²/36 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 161 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112.5 m²/75 m² di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 44.000.000

1. MOTOR, VIAR CROSS 200 CC VIAR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.240.651

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.384.240.651

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.334.240.651

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.